



LPM IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung
<https://jurnal.lp2msasbabel.ac.id/index.php/sus> ISSN 2655-0695 (Online)

Pendidikan Politik di Perguruan Tinggi: Sebuah Konsepsi *Political Education in Higher Education: a Conception*

Imam Alfikri Pratama
IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung, Indonesia

Abstract

As an effort, political education becomes an investment in sustainable democracy. The result is citizens' political awareness and active involvement democratically in national matters. With an opportunity of demographic bonus in the future, the best political therapy must be implemented to young people as a guarantee of the well-functioning of democracy, in which some of them are higher education students. Political education in higher education is constructed in both formal and non-formal forms. In the formal form, it is carried out through political teaching, while the non-formal form is related to the way individuals summarize political knowledge through reflection on a political system. It can be carried out together between teaching through Pancasila and Citizenship Education in the curricular domain and social learning through student organizations in the non-curricular domain.

Keywords

Political Education
Higher Education

Abstrak

Sebagai sebuah usaha, pendidikan politik merupakan investasi bagi keberlangsungan demokrasi. Hasil akhirnya adalah kesadaran politik dan keterlibatan aktif warga negara secara demokratis dalam urusan kebangsaan. Dengan peluang bonus demografi di depan, terapi politik terbaik harus diterapkan kepada anak muda sebagai jaminan berjalannya demokrasi dengan baik, sebagian dari mereka ini adalah mahasiswa yang duduk di bangku perguruan tinggi. Pendidikan politik di Perguruan Tinggi terkonstruksi dalam bentuk formal maupun non formal, dalam bentuk formal pendidikan politik dilakukan melalui pengajaran politik sedangkan dalam bentuk non formal adalah bagaimana individu merangkum pengetahuan politik melalui refleksi terhadap sebuah sistem politik. Hal ini bisa dilakukan secara beriringan antara pengajaran melalui Pendidikan Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan pada domain kurikuler serta melalui pembelajaran sosial kemasyarakatan melalui organisasi mahasiswa pada domain non kurikuler

Kata Kunci

Pendidikan politik
Perguruan Tinggi

Korespondensi

Imam Alfikri Pratama
imam.alfikri@gmail.com

Pendahuluan

Politik sebagai usaha mewujudkan kebaikan bersama, menuntut partisipasi oleh semua elemen negara. Dalam sebuah Negara demokrasi peran dan keikutsertaan warga negara ini sebuah keharusan yang tidak bisa di tawar-tawar. Di Indonesia pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia secara eksplisit menyebutkan bahwa negara Republik Indonesia adalah negara yang berkedaulatan rakyat . Di titik ini warga negara harus terbangun kesadarannya untuk ikut terlibat dalam kehidupan dan proses politik berbangsa dan bernegara dalam rangka daulat rakyat. Warga negara harus bertumbuh menjadi warga negara yang melek politik. Melek politik adalah dimana warga Negara secara sadar mengerti hak dan kewajibannya, utamanya dalam bidang politik dan kemudian ikut berpartisipasi baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses politik, proses perumusan kebijakan, memantau implemetasi kebijakan publik dan ikut terlibat sebagai kontrol sosial bilamana kebijakan publik tersebut keluar dari haluan.

Sebagai sebuah negara demokrasi, membentuk pengetahuan dan partisipasi politik adalah sebuah kewajiban. Demokrasi hanya akan berjalan dengan adanya keterlibatan warga negara. Sejalan dengan ini Hamdam, Tahir (2020) melihat bahwa meningkatkan pemahaman politik dan pendidikan politik adalah hal penting bagi sebuah negara. Kemudian Bashori (2018) mengemukakan bahwa literasi politik merupakan aspek penting dalam konsolidasi demokrasi. Kurangnya pemahaman tentang isu-isu politik dan kegiatan politik tidak jarang menyebabkan masyarakat apatis terhadap berbagai proses demokrasi dan dinamika politik pemerintahan di sekitarnya

Melihat urgensi keterdidikan politik ditengah laju demokrasi bangsa Indonesia sekarang ini. Muncul tantangan bagaimana mewariskan proses demokrasi yang bertumbuh baik kepada generasi muda, karena para generasi muda ini adalah pewaris keadaban bangsa ini kedepan.

Secara sempit pendidikan politik adalah bentuk sosialisasi politik yang bertujuan mengenalkan cara untuk memahami politik kepada warga negara serta dapat berpartisipasi secara aktif dalam sistem politik yang sedang berjalan, Puka (2013) mendefinisikan pendidikan politik sebagai bentuk dari elaborasi kritis dari sosialisasi politik yang bertujuan membangun sikap dan pilihan politik. Menurut perspektif inimealui sosialisasi politik individu bisa mengenali sistem politik dan menentukan sikap serta pilihannya terhadap proses politik

Proses ini dipengaruhi oleh lingkungan individu berada baik secara sosial, ekonomi, politik dan budaya. Oleh karena itu, pendidikan politik yang diperoleh oleh setiap individu dapat menimbulkan pengalaman-pengalaman politik yang baru sehingga menimbulkan sebuah perilaku politik. Dalam rumusan Pratama, (2016) proses ini adalah sarana membiasakan nila dan berpengaruh terhadap sikap dan pilihan politik. Pada akhirnya akan menjadi *input* dalam terbentuknya budaya politik.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik jumlah Penduduk usia muda Indonesia ini adalah 63,82 Juta Jiwa (*Publikasi BPS Tahun 2018*). Lebih lanjut dalam penelitian Mc. Kinsey Institute (Setiawaty, 2014) menyebutkan Indonesia akan tumbuh menjadi negara dengan pertumbuhan ekonomi terbesar di dunia pada tahun 2030. Hal ini salah satunya disebabkan populasi anak muda yang menunjang pertumbuhan ekonomi Indonesia. Lebih dari 70% populasi penduduk adalah usia produktif.

Pendidikan politik yang baik harus diarahkan untuk kepada mereka ini supaya memiliki pemahaman politik secara integratif. Maksudnya adalah upaya menanamkan pengetahuan politik dan membangun partisipasi aktif dalam proses politik yang berjalan. Hal ini menggambarkan bahwa pembelajaran politik yang diberikan kepada generasi muda merupakan usaha pembangunan bangsa. Generasi muda sebagai popupasi terbesar dari warga negara harus menjadi titik fokus utama dalam pendidikan politik. Karena merekalah nanti yang akan menentukan laju kemajuan bangsa.

Salah satu populasi dari warga negara muda ini adalah mahasiswa, mereka ini cenderung tertarik dengan masalah kebangsaan. Hal ini menjadikan pendidikan politik penting untuk diterapkan kepada mereka, sebagai bekal pengetahuan. Kabar baiknya pendidikan politik yang mereka terima sebenarnya cukup. Diantaranya Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yang wajib diajarkan perguruan tinggi, informasi politik yang mereka saluran informasi dan kumnikasi , serta pembelajarn sosial politik yang dilakukan oleh organisasi mahasiswa.

Undang-Undang nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Pasal 1 ayat 2 adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia. Perguruan tinggi sebagai lembaga pendidikan formal menjadi wadah mahasiswa untuk mengasah kemampuan akademisnya, disinilah pendidikan politik terformalisasi dalam bentuk pendidikan kewarganegaraan dan pendidikan pancasila yang merupakan kuliah wajib. Selain itu juga ditemukan muatan-muatan lain yang disisipkan dalam bentuk lain sesuai dengan otoritas perguruan tinggi tersebut.

Kemudian pendidikan politik ini pada tahapnya akan bersinggungan dengan pengaruh lain, misalnya lingkungan masyarakat. Disini pendidikan politik terpengaruh oleh refleksi pribadi individu terhadap lingkungannya sehingga hasil yang diharapkan menjadi tidak maksimal. Salah satu yang menjadi faktor utama adalah arus disrupsi informasi, dunia kini terhubung dengan jejaring maya yang membuat satu dengan yang lain seolah tanpa batas. Persepsi-persepsi mahasiswa mengenai politik semakin lekat dengan dunia tanpa batas yang terhubung dengan internet melalui kanal-kanal informasi sosial media mereka. Hal ini kemudian mempengaruhi refleksi anak muda terhadap politik, persepsi yang tumbuh kemudian dibentuk oleh informasi-informasi sumir yang bertebaran tanpa saring. Dunia digital ini ternyata berpengaruh besar terhadap tingkat pengetahuan politik mahasiswa.

Wajah politik kenegaraan sekarang, dihiasi maraknya berita tidak benar dan menajamnya politik identitas yang penyebaran informasinya ditopang oleh infrastruktur digital. Hal ini merupakan salah satu penyebab berubahnya refleksi kritis mahasiswa terhadap politik. Politik dimaknai secara negatif oleh mahasiswa sehingga muncul kesan untuk menjauhi politik. Yang muncul kemudian adalah semua “kekotoran” politik tanpa melihat sisi baiknya. Hal inilah yang harusnya diperbaiki melalui pendidikan politik yang ideal bagi mahasiswa sebagai bagian dari menyiapkan masa depan mereka sekaligus melanggengkan dan memperbaiki demokrasi politik bangsa.

Artikel ini mengurai bagaimana bentuk pendidikan politik yang diterima mahasiswa di perguruan tinggi, lokus utamanya adalah menjelaskan bentuk-bentuk pendidikan politik yang mungkin diterima mahasiswa di perguruan tinggi. Karena dibatasi dengan konstruksi pendidikan politik pada materi pendidikan kewarganegaraan dan pendidikan pancasila maka artikel ini hanya membatasi pada pendidikan tinggi program sarjana, yang didalamnya kedua mata disebut diatas adalah mata kuliah wajib sesuai dengan Undang-Undang Pendidikan Tinggi. Disamping itu juga artikel ini melihat bagaimana pendidikan politik ideal dilakukan melalui kegiatan-kegiatan kemahasiswaan yang merupakan bagian dari Pendidikan Kewarganegaraan kemasyarakatan (*citizenship education*).

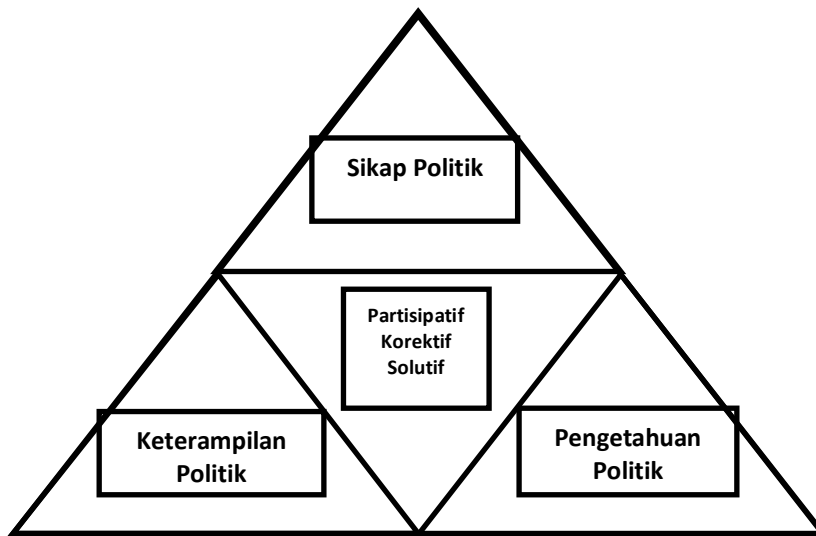
Pembahasan

A. Makna Pendidikan Politik

Mengurai makna pendidikan politik pertama harus melihat tujuan pendidikan sebagai usaha menanamkan nilai dan transfer pengetahuan. Kemudian makna politik secara sederhana adalah usaha mewujudkan kebaikan bersama (Budiarjo 2008). Politik pada bagian ini tidak hanya dilihat sebagai bagian dari politik praktis tapi lebih dari itu, yakni keseharian individu sebagai warga negara ataupun bagian dari kelompok serta masyarakat.

Pendidikan politik secara sederhana adalah belajar tentang politik dan kemudian pengetahuan tersebut menjadi landasan perilaku politik. Sebagai sebuah usaha pendidikan, pendidikan politik memuat tiga hal yaitu transfer pengetahuan (kognitif), membentuk karakter (afektif) dan membangun keterampilan (psikomotorik) politik sebagai warga negara.

Gambar I. Aspek Pendidikan Politik



Pendidikan politik bisa dilihat sebagai proses belajar tentang pengetahuan politik dalam rangka membentuk individu yang sadar politik. Tiga aspek tersebut adalah pengetahuan politik, sikap politik, dan keterampilan politik. Ketiganya dilandasi nilai-nilai partisipatif, korektif dan solutif. Kartono (2009) mengemukakan bahwa Pendidikan politik adalah upaya pendidikan dalam rangka membentuk individu sadar dan menjadi pelaku politik yang bertanggung jawab, seta dilakukan dengan sengaja dan.

Disisi lain pembelajaran politik sebagai sebuah usaha sadar untuk mengubah sikap dan perilaku individu dan masyarakat sehingga mereka memahami dan menghayati nilai-nilai yang terkandung dalam suatu sistem politik yang ideal yang hendak dibangun dalam lingkung masyarakat dan negara dimana mereka berada. Kemudian pendidikan politik bisa dijelaskan sebagai bagian dari sosialisasi politik yang membangun sikap dan pilihan politik. Banyak ahli yang melihat pendidikan politik dan sosialisasi politik adalah satu kesatuan. Dari sudut pandang proses pendidikan politik merupakan bagian dari sosialisasi politik. Pendidikan politik, sosialisasi politik dan pelatihan warga negara memang silih berganti digunakan dalam menjelaskan usaha pembelajaran politik. (Affandi, 2011), pendapat lain Greenstain (Al Muchtar, 2000) menjelaskan bahwa Sosialisasi politik adalah semua pembelajaran politik formal dan informal, disengaja dan tidak direncanakan, yang bahkan didalamnya termasuk pembelajaran non politik yang berhubungan dengan karakteristik individu. Kemudian Rush dan Althoff (2001) melihat sosialisasi politik sebagai proses individu memahami sistem politik yang kemudian menentukan sikap-sikap politiknya.

Lebih lanjut variabel sosialisasi politik terdiri dari faktor sosial, faktor ekonomi dan kebudayaan serta oleh pengalaman individunya. Pengalaman yang menentukan pengetahuan politik individu ini erat hubungannya dengan materi pendidikan politik apa yang diterima oleh individu tersebut. Dari pengalaman ini kemudian individu yang menerima pengetahuan politik, melakukan refleksi dan akan merumuskan preferensi perilaku politiknya.

Pendidikan politik sebagai bagian dari sosialisasi politik dilaksanakan lewat bentuk formal dan non formal. Secara formal adalah upaya sengaja memberikan pengajaran tentang politik. Sedangkan dalam bentuk non formal dilakukan individu dengan merangkul pemahamannya melalui apa yang terjadi pada sistem dan proses politik, utamanya proses politik yang sedang terjadi.

Selain sebagai bagian dari sosialisasi politik, pendidikan politik juga merupakan bagian dari usaha menumbuhkan partisipasi politik individu. Selain itu pendapat lain mengemukakan bahwa pendidikan politik sebagai salah satu fungsi infrastruktur dan suprastruktur politik untuk meningkatkan pemahaman politik rakyat agar dapat berpartisipasi dalam sistem dan proses politik. (Kantaprawira dalam Affandi 2011).

Dalam sudut pandang ini pendidikan politik menitikberatkan pada aspek partisipasi warga negara. Perspektif ini mengenyampingkan aspek keterlibatan warga negara dalam mengkritisi proses atau sistem politik. Dalam pendidikan politik istilah politik yang dipakai maknanya relatif luas termasuk hukum, ideologi bahkan ekonomi juga termasuk tentang hak asasi manusia. Hal diatas merupakan bagian dari nilai-nilai politik sebagai penopang utama pemahaman kebangsaan. Warga negara yang memiliki pemahaman nilai-nilai politik dengan sendirinya akan memiliki motivasi dalam ikut berpartisipasi dalam politik. Karena itu pengetahuan dalam pendidikan politik merupakan bekal dalam memahami kehidupan politik (Affandi 2011). Selain memahami juga dituntut untuk mengaplikasikan nilai-nilai politik mereka memahami dan menghayati betul nilai-nilai yang terkandung dalam sistem politik yang ideal yang hendak dibangun (Alfian 1981).

Dari banyak pengertian tersebut, pendidikan politik minimal memiliki dua prasyarat utama yaitu. Pertama, individu mengenal dan memahami nilai-nilai dasar politik. Kedua, tidak hanya memahami tetapi dapat mengambil peran menjadi seorang warga negara yang ditunjukkan dengan adanya partisipasi politik aktif. Giesecke (Affandi 2011) membatasi konstruksi pendidikan politik sebagai berikut, yaitu : *Bildungswissen* : karakter individu sebagai warga negara. *Orientierungswissen* : realitas sistem politik. Kemudian *Verhaltensweise* : norma hukum. Serta terakhir adalah *Aktionwissen* yaitu perilaku politik.

Secara sederhana pendidikan politik berhubungan dengan pembentukan pemahaman politik warga negara dalam sebuah sistem politik. Warga negara yang memiliki pemahaman politik adalah warga negara yang sadar dan paham dengan peran dan kedudukannya dalam sebuah sistem politik. Dalam pelaksanaannya pendidikan politik merupakan sebuah usaha sistematis membangun keterdidikan politik. Sebagai sebuah usaha sistematis membangun pemahaman melalui pendidikan politik harus memiliki bentuk dan model yang terkonstruksi.

Dengan mendapatkan pemahaman yang baik dari bentuk pendidikan politik yang baik maka akan terbentuk partisipasi politik. Steffen dan Sulzer (2018) menjelaskan bahwa kapasitas partisipasi warga negara ditentukan oleh sumber daya yang dimiliki oleh individu, salah satunya adalah kemampuan politik yang terdiri dari pengetahuan tentang sistem politik, proses politik, dan kemampuan membuat keputusan dalam masalah politik. Maka dari itu pendidikan politik adalah usaha membangun pengetahuan dan keterampilan politik yang erat kaitannya dengan kompetensi warga negara untuk berpartisipasi dalam urusan kebangsaan. Hal ini secara sederhana bisa ditandai dengan seberapa besar partisipasi warga negara dalam urusan demokrasi dan politik.

B. Konstruksi Pendidikan Politik

Pendidikan politik sebagai sebuah usaha pembelajaran mempunyai banyak karakteristik, secara garis besar ada dua pola pendidikan politik yang bisa dijalankan yaitu : pertama melalui pendidikan politik melalui jalur formal yang secara kurikuler mempunyai desain kurikulum dan materinya tersendiri, hal ini dilakukan melalui Pendidikan Kewarganegaraan (termasuk juga Pendidikan Pancasila). Yang kedua adalah pendidikan sosial kemasyarakatan yaitu melalui apa yang diterima oleh individu dalam kehidupannya sehari, semisal melalui media massa, media sosial dan ikut serta dalam organisasi sosial kemasyarakatan. Bentuk ini harus dijalankan bersamaan untuk mencapai hasil yang baik.. Kartaprawira (2004) menjelaskan pendidikan politik bisa dilakukan antara lain melalui : bahan bacaan, media audio visual dan organisasi kemasyarakatan serta melalui lembaga pendidikan formal.

Dalam Undang-Undang No. 2 tahun 2008 tentang Partai Politik mengamanatkan bahwa pendidikan politik juga menjadi tanggung jawab bersama, yaitu tanggung jawab seluruh warga negara. Sebagai sebuah usaha pengajaran pendidikan politik harus memiliki konsep dasar pelaksanaannya, acuan ini kemudian disebut kurikulum dalam pendidikan politik. Brownhill dan Smart (1989) berpendapat konstruksi pendidikan politik setidaknya harus memuat hal-hal yang mendukung terbangunnya pengetahuan politik, keterampilan politik, dan sikap yang didasari oleh nilai-nilai dalam politik .

Lebih lanjut Brownhill dan Smart (1989) menyebutkan secara minimal kurikulum pendidikan politik harus memuat hal-hal berikut : Hukum dan konstitusi, sifat kekuasaan, hak dan kewajiban, konsep politik dasar, struktur pemerintahan daerah dan pusat, konsep ekonomi nasional, sejarah, dan analisis diri.

Pendapat lain menjelaskan bahwa rumusan pendidikan politik bisa diorganisasikan dengan cakupan sebagai berikut : Kepemimpinan, manajemen organisasi, latihan bela negara, wawasan nusantara, nilai kelimuan, pembinaan watak dan keperibadian, serta menumbuhkan sikap apresiatif terhadap lingkungan keluarga dan masyarakat (Affandi 2011).

Materi pendidikan politik tersebut bisa dibelajarkan melalui banyak cara seperti : pembelajaran di kelas, ceramah, diskusi latihan organisasi dan seminar-seminar ilmiah. Bentuk pengajaran paling ideal adalah melalui proses belajar di kelas-kelas lembaga pendidikan formal. Di Perguruan Tinggi salah satunya adalah melalui Pendidikan Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan. Sebenarnya Pendidikan Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan secara garis besar merupakan bagian dari pendidikan politik itu sendiri. Misalnya melalui apa yang menjadi tujuan Pendidikan Kewarganegaraan itu sendiri.

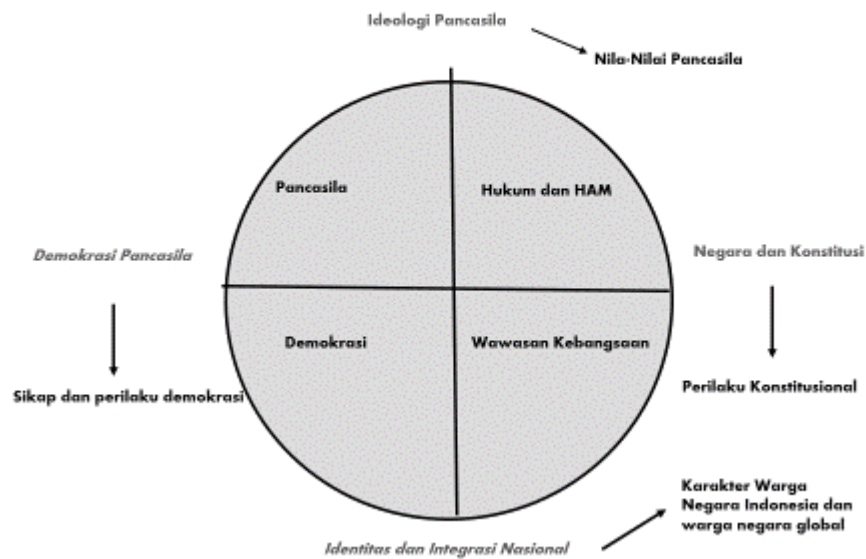
Wahab dan Sapriya (2011) mengungkapkan bahwa peran warga negara yang baik (*a good citizen*) yang bertanggung jawab dengan kewajibannya sebagai warga negara (*to reform certain duties*) diantaranya mematuhi hukum, membayar pajak, menghormati hak-hak orang lain, serta secara umum memenuhi kewajiban-kewajiban sosialnya sebagai masyarakat. Warga negara yang baik ini memiliki banyak kompetensi salah satunya adalah kompetensi politik, inilah titik persinggungan antara pendidikan kewarganegaraan dan pendidikan politik, dimana secara sempit pendidikan politik dilihat sebagai bagian dari Pendidikan Kewarganegaraan. Lebih lanjut melalui Pendidikan politik pada Pendidikan Kewarganegaraan dapat membina peserta didik menjadi warga negara yang melek politik. Claes, dkk (2009) mengemukakan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan sebagai program Pendidikan Politik yang tugas peran utamanya membina peserta didik menjadi warga negara yang bertanggung jawab. Rumusan lain merumuskan warga negara yang melek politik adalah yang paham hukum dan UUD 1945 negara RI, berkontribusi dalam pembangunan dan peduli akan masalah bangsa (Djahiri 1993)

Pendidikan Kewarganegaraan sebagai proses pembelajaran memiliki multi tujuan, karena berhubungan dengan karakter warga negara. Branson merumuskan tiga komponen Kewarganegaraan yang esensial yaitu *Civic Knowledge* : pengetahuan kewarganegaraan, *Civic Skills* : keterampilan kewarganegaraan, dan *Civic Disposition* : sikap atau watak kewarganegaraan (Winarno 2013)

Tiga komponen pendidikan kewarganegaraan tersebut secara lebih luas adalah pengetahuan kewarganegaraan yaitu apa yang warga negara ketahui. Keterampilan kewarganegaraan meliputi keterampilan intelektual dan keterampilan partisipasi warga negara. Terakhir watak kewarganegaraan adalah karakter pribadi dan publik warga negara.

Ketiga komponen pendidikan kewarganegaraan berkaitan dengan *Civic Intelligence Quotient* yakni kecerdasan intelektual warga negara. Lebih lanjut bisa dijabarkan sebagai berikut : warga negara yang memiliki sikap dan pengetahuan kewarganegaraan akan membentuk kepercayaan diri warga negara (*civic confidence*). Selanjutnya dengan memiliki pengetahuan dan keterampilan kewarganegaraan akan menjadikan warga negara memiliki keterampilan berpartisipasi (*civic competence*). Kemudian warga negara yang memiliki keterampilan berpartisipasi akan menjadi warga negara yang memiliki komitmen kebangsaan kuat (*civic commitment*). Tujuan paripurnanya adalah membentuk warga negara yang cerdas serta baik (*smart and good citizenship*).

Di Perguruan Tinggi, pendidikan politik harus berjalan beriringan antara pelaksanaan Pendidikan Kewarganegaraan dan Pendidikan Pancasila serta melalui Pendidikan Sosial Kemasyarakatan utamanya melalui organisasi-organisasi kemahasiswaan. Yang pertama adalah Pendidikan Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan materi-materi yang bisa dimuat dalam pembelajaran pendidikan politik dapat digambarkan sebagai berikut :



Gambar II Materi Pendidikan Politik

Berdasarkan gambar diatas bisa dijelaskan bahwa ada 4 materi pokok yang harus menjadi *core* dari pendidikan politik di perguruan tinggi yaitu Pancasila, Hukum dan HAM, Demokrasi, serta Wawasan Kebangsaan. Materi pendidikan politik ini menjadi dasar membangun struktur kurikulum pendidikan politik yang selanjutnya bisa diterjemahkan kedalam perluasan materi yaitu ideologi Pancasila yang tujuannya adalah menginternalisasikan nilai-nilai Pancasila, kemudian Negara dan Konstitusi yang memuat tujuan terbentuknya perilaku konstitusional. Yang ketiga adalah Identitas dan Integrasi Nasional hal ini berkaitan dengan karakter individu sebagai warga negara Indonesia sekaligus sebagai warga negara global. Terakhir adalah demokrasi Pancasila ini berkaitan dengan keterampilan politik warga negara dalam berdemokrasi.

Dari materi yang dimuat dalam pendidikan politik yang ada dalam Pendidikan Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan di Pendidikan Tinggi setidaknya ada empat 4 utama yang harus menjadi tolak ukur pengembangan kurikulumnya yaitu pengetahuan politik, keterampilan intelektual, keterampilan partisipasi politik, dan sikap politik. Karena sasaran pendidikan politik di Perguruan Tinggi adalah anak muda maka pendekatan yang dipakai harus sesuai dengan karakteristik mereka, tujuan pendidikan politik bagi generasi muda sejatinya adalah menyiapkan generasi penerus peradaban bangsa. Kartono (2009) menyebutkan tujuan pendidikan politik di Indonesia adalah membentuk generasi muda yang sadar politik, dan menjalankan hak serta kewajiban politiknya, selain itu juga membentuk manusia yang sesuai dengan karakteristik keIndonesiaan.

Pendekatan pembelajaran politik bagi generasi muda ini disamping melalui penyampaian materi di kelas-kelas kuliah juga harus dilengkapi dengan bentuk-bentuk pengayaan terstruktur, misalnya memberikan ruang diskusi dan tanya jawab kritis terhadap situasi kebangsaan yang sedang terjadi. Hal ini penting karena para mahasiswa yang duduk di Pendidikan Tinggi ini sangat terpapar oleh arus disrupsi informasi, informasi yang mereka terima dari kanal-kanal digital kadang bersifat tidak benar dan ini tentu saja mempengaruhi penerimaan mereka terhadap politik. Untuk itulah ruang diskusi disertai dengan landasan teoritis yang kuat sangat diperlukan.

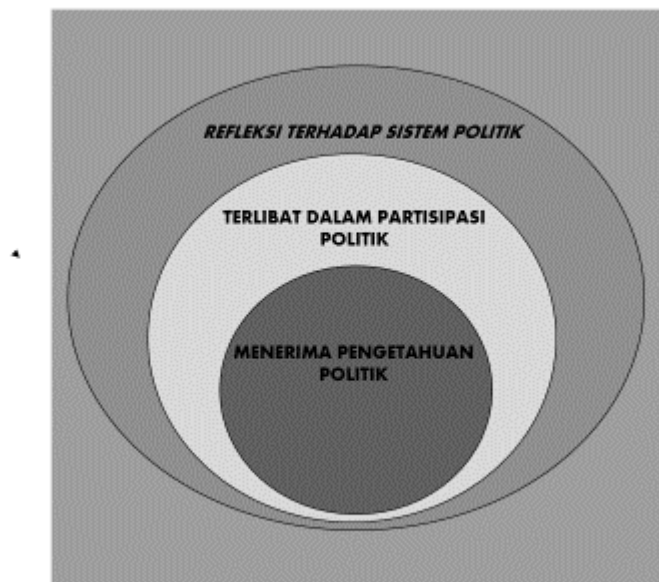
Disamping itu dengan menumbuhkan ruang-ruang diskusi di kelas pendidikan politik di Perguruan Tinggi harus diaktualisasikan dengan memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengelaborasi secara kritis pengetahuannya melalui belajar langsung di organisasi kemahasiswaan. Banyak kanal-kanal organisasi kemahasiswaan yang bisa dimanfaatkan untuk belajar politik ini. Penelitian Pratama (2016)

menjelaskan bahwa organisasi mahasiswa berperan dalam melakukan Pendidikan Politik sebagai penopang pembentukan budaya politik ideal. Kemudian Affandi (2011) mengemukakan bahwa secara spesifik, penyelenggaraan pendidikan politik bagi organisasi kepemudaan bertujuan meningkatkan partisipasi politik, memberikan kesadaran politik dan memberikan rasa tanggung jawab politik.

Pada Pendidikan Politik di Organisasi Kemahasiswaan ini individu dilatih keterelampilan politiknya secara langsung melalui interaksi dan kegiatan-kegiatan sosial. Dengan menerima bentuk-bentuk pendidikan politik seperti ini generasi muda yang duduk di perguruan tinggi akan menjadi warga negara yang bertanggung jawab secara politik. Hakhverdian, dkk (2011) mengemukakan bahwa individu yang berpendidikan tinggi cenderung memilih dan berpartisipasi dalam politik dan menunjukkan tingkat keterlibatan yang tinggi dalam urusan kebangsaan. Jelas bahwa semakin Tinggi Pendidikan seseorang akan berkorelasi dengan aktivitas politiknya baik secara langsung maupun tidak langsung.

Pada pendidikan politik di organisasi kemahasiswaan ini individu sebagai warga negara terdorong secara sukarela dalam melaksanakan pendidikan politiknya, hal ini menjadi kelebihan dalam pendidikan politik bentuk ini. Dorongan individual ini akan membuat pendidikan politik akan berjalan lebih maksimal. Selain melalui dua bentuk pendidikan politik diatas, elaborasi kritis individu yang duduk di perguruan tinggi terhadap sumber-sumber informasi politik juga termasuk salah satu bentuk pendidikan politik. Sumber informasi ini misalnya didapatkan dari media massa, internet dan media sosial. Di tengah arus disrupsi informasi dunia digital sekarang ini, informasi politik ini bisa ditelaah lebih lanjut merupakan bahan kajian utama bagi individu dalam mendapatkan bentuk-bentuk pendidikan politik.

Akhirnya dari bentuk-bentuk pendidikan politik diatas tentu saja hasil akhirnya adalah individu yang menjalankan perannya sebagai warga negara dengan cerdas dan baik. Target diatas juga berlaku bagi individu yang duduk di perguruan tinggi, mereka adalah warga negara muda yang peran dan kontribusinya sebagai warga negara tentu masih akan panjang. Inilah yang menyebabkan pendidikan politik sebenarnya sangat penting bagi generasi muda. Hasil akhir dari pendidikan politik bagi generasi muda bisa dijelaskan dengan gambar berikut :



Gambar III Model Keterlibatan Politik Warga Negara

Target pertama dari pendidikan politik adalah bagaimana individu bisa menerima pengetahuan politik sebagai dasar bagi perilaku dan sikap politik mereka selanjutnya, yaitu partisipasi politik. Disini bentuk partisipasi adalah partisipasi aktif individu dalam urusan politik kebangsaan, seperti pemilihan

umum, kontrol sosial dan kebijakan serta yang lainnya. Kemudian setelah berpartisipasi adalah melakukan refleksi terhadap sistem politik yang sedang terjadi, hal ini menunjang untuk terbentuknya budaya politik yang ideal.

Kesimpulan

Pendidikan politik bagi generasi muda adalah usaha pengajaran politik bagi warga negara muda dalam rangka membangun pengetahuan politik, membentuk warga negara yang berpartisipasi secara politik dan terakhir menumbuhkan refleksinya terhadap sistem politik demi terwujudnya budaya politik yang ideal. Generasi muda ini sedikit diantaranya adalah para mahasiswa yang duduk di perguruan tinggi, mereka ini adalah warga negara yang terdidik secara akademik. Dengan cap terdidik warga negara muda ini memiliki peran dan fungsi lebih ditengah warga negara lainnya. Karena alasan ini pula maka pendidikan politik bagi mahasiswa menjadi hal yang penting untuk dilaksanakan.

Pendidikan politik di perguruan tinggi bisa dioperasionalkan kedalam dua bentuk yaitu Pendidikan secara kurikuler dan non kurikuler, secara formal pendidikan politik bisa dilaksanakan melalui pendidikan Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan sesuai amanat Undang-Undang tentang Pendidikan Tinggi. Materi-materi dalam kedua mata kuliah secara garis besar sudah memuat materi pokok pendidikan politik. Selanjutnya adalah bentuk Pendidikan Politik yang dijalankan melalui organisasi mahasiswa, disini mahasiswa belajar secara sosial dengan berinteraksi langsung dengan materi pendidikan politik yang lebih praktis. Perguruan tinggi harus membuka lebar peran bagi organisasi mahasiswa untuk tumbuh dan berkembang di lingkungan kampus. Kemudian selain dua bentuk diatas secara individual mahasiswa bisa mendapatkan pembelajaran politik melalui informasi politik yang mereka dapatkan melalui media massa, internet dan media sosial.

Referensi

- Affandi. Idrus (2011). *Pendidikan Politik (Mengefektivkan Organisasi Pemuda, Melaksanakan Politik Pancasila dan UUD 1945)* Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia
- Al Muchtar, Suwarma (2000). *Pengantar Studi Sistem Politik Indonesia*. Bandung: Gelar Pustaka Mandiri
- Bashori (2018). *Pendidikan Politik Di Era Disrupsi*. Sukma: Jurnal Pendidikan, Volume 2 Issue 2
- Budiarto, Miriam. (2008). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Gramedia Pustaka
- Brownhill, R and Patricia Smart (1989). *Political Education*. London and New York: Routledge
- Claes, Ellen, Hooghe. Marc Dan Stolle, Dietlind. (2009). *The Political Socialization Of Adolescents In Canada: Differential Effects Of Civic Education On Visible Minorities*. Canadian Journal Of Political Science Vol 42 No 3. Hal 613-636
- Djahiri. A. Kosasih (1993). *Membina Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial dan PLS dan PPS yang Menjawab Tantangan Hari Esok*. Jurnal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, 1/1993. Bandung: Forum Komunikasi FPIPS/IPS Indonesia
- Handam M. Tahir. , Muchlas. (2020) . *Political Education For High School Students In Makassar City*. Journal La Edusci Vol. 01, Issue 01 (001-006)
- Hakhverdian, Armen. Brug, Wouter van der dan Vries, Catherine de. (2011). *The Emergence Of A 'Diploma Democracy'? The Political Education Gap In The Netherlands, 1971-2010*. Acta Politica Vol. 47. No. 3. Hal. 229-247

- Kantaprawira, R. (2004). *Sistem Politik Indonesia: Suatu Model Pengantar*. Bandung ; Sinar Baru Algesindo
- Kartono, K. (2009). *Pendidikan Politik sebagai Bagian dari Pendidikan Orang Dewasa*. Bandung : Mandar Maju
- Puka. Edi (2013). *Political Education. The Global Education of Citizen through Active Citizenship*. Studi sulla formazione. Firenze University Press. Hal . 229-236
- Pratama. Imam, Alfikri. (2016). *Peran Pendidikan Politik Pada Organisasi Mahasiswa KAMMI dan IMM di Kota Pangkalpinang dalam Pembentukan Budaya Politik Pancasila*. Al-Mabsut: Jurnal Studi Islam dan Sosial.
- Pratama, Imam Alfikri (2016) *Pendidikan Politik Dalam Upaya Pembentukan Budaya Politik Pancasila Bagi Mahasiswa*. Tesis Departemen Pkn Sekolah Pascasarjana UPI. Bandung
- Rush, Michael dan Althoff, Philip (2001). *Pengantar Sosiologi Politik*. Jakarta: PT Rajawali Press
- Setiawaty. Diah. (2014). *Mendorong Partisipasi Pemilih Muda Melalui Pendidikan Politik Yang Programatik*. Jurnal Islamic Review. Volume III No. 1
- Steffen dan Sulzer (2018). *Just Another Brick In The Wall? The Relationship Between Classroom-Based Political Education and The Political Interest Of Young Adults in Switzerland* Journal Of Youth Studies, Vol. 21, No. 4, 552-575
- Wahab, Abdul Aziz Dan Sapriya. (2011). *Teori Dan Landasan Pendidikan Kewarganegaraan*. Bandung: Penerbit Alfabeta
- Winarno. (2013). *Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Isi, Strategi, dan Penilaian*. Jakarta: PT Bumi Aksara
- <https://www.bps.go.id/publication/2018/12/21/572f94151d090083dd742d6/statistik-pemuda-indonesia-2018>